

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Peneliti merasa perlu untuk meninjau kembali hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki objek kajian yang hampir sama dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mencegah terjadinya pengulangan penelitian pada objek yang sama dan untuk mencegah adanya kecurigaan adanya plagiarisme pada suatu karya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Analisis Kebijakan Pertambangan

Banyak akademisi yang telah melakukan studi analisis kebijakan pertambangan, yang dibahas dalam beberapa artikel. Seperti karya dari (Semuel Rizal, 2013), (Sefiana Giansi, 2018), (Rina Safitri, 2022), (Wahyu Hidayat, 2012), (Marennu, 2019). Pada hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan pertambangan terhadap perekonomian masyarakat, yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat, kebijakan perusahaan pertambangan terhadap masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) sektor yakni pendidikan berupa bantuan beasiswa, sektor kesehatan berupa pemberian pengobatan gratis dan mengadakan sunat massal, sektor ekonomi berupa memberikan lapangan pekerjaan, sektor pertanian pemberian bibit tanaman. Adapun penelitian ini, peneliti membahas mengenai kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat dari sektor Pendidikan, sektor pertanian serta implementasi kebijakan pertambangan

pada masyarakat dan fenomena ekonomi warga Desa Tolowe Ponre Waru.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai karya tulis yang membahas mengenai studi pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Seperti karya (Rosanna, 2015), (Kuerniawati, 2013), (Tyas Arma Rindi, 2019), (Prio Tri Isyanto, 2017), (Indah Reski Ramadani, 2020). Pada hasil penelitian tersebut menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa baik dari wisata, pertanian maupun lembaga BUM Desa, dapat menambah penghasilan masyarakat, dengan mengajarkan generasi muda cara menciptakan penemuan terbaru dan membuka lapangan pekerjaan, kita dapat menurunkan angka pengangguran dan mengurangi kejahatan. Keterbatasan penelitian ini termasuk kurangnya penggunaan paradigma pemberdayaan dan pelaksanaan fase pemantauan dan penilaian yang tidak tepat.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kebijakan

Noeng Muhadjir menyatakan bahwa kebijakan adalah upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial demi kebaikan masyarakat yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut harus menjamin setidaknya empat kriteria utama, yaitu:

- a. peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- b. adanya keadilan sosial, keadilan hukum, dan kesempatan untuk mengembangkan diri;

- c. pemberian kesempatan aktif bagi partisipasi masyarakat (dalam pemecahan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan); dan
- d. mendorong pembangunan berkelanjutan. (Noeng Muhadjir, 2000).

Secara empiris, kebijakan dapat berbentuk peraturan, dan program. Dalam sebuah negara, kebijakan dipandang sebagai seperangkat tindakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dengan tujuan tertentu yang kemudian dilakukan oleh individu atau sekelompok aktor untuk mengatasi masalah tertentu.

Untuk melaksanakan suatu tugas, menunjukkan kepemimpinan dan bertindak dengan cara-cara tertentu, atau membuat pernyataan cita-cita, prinsip-prinsip, atau maksud-maksud dalam memecahkan masalah, manajemen harus mengikuti seperangkat konsep dan prinsip yang dikenal dengan kebijakan. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, sebagai peta jalan untuk mengambil tindakan.

1. Kebijakan Publik

Komponen penting dari politik, menurut konsep kebijakan publik dari A. Hoogerwert, adalah pencapaian tujuan-tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan publik, dalam pandangan Anderson, adalah interaksi antara pemerintah dan lingkungannya (Margono, 2003).

Lebih lanjut, menurut Gerston, kebijakan publik adalah upaya untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan oleh wakil-wakil

dari semua tingkat pemerintahan. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan public, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah suatu pilihan yang dibuat melalui proses politik untuk suatu tindakan, program, dan rencana tertentu dalam menata pendidikan. Kebijakan pendidikan mengambil bentuk arahan tindakan yang sederhana maupun rumit, luas maupun khusus, tepat maupun longgar.

Istilah "kebijakan pendidikan" juga dikenal dengan istilah "perencanaan pendidikan", "rencana induk pendidikan", "regulasi pendidikan", atau "yang lazim disebut dengan kebijakan pendidikan" (lazimnya disebut dengan kebijakan pendidikan), namun terdapat perbedaan isi dan cakupan dari masing-masing makna yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Rohman, 2009). Kebijakan publik, khususnya kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan, dipandang sebagai komponen dari kebijakan pendidikan (Nugroho, 2008). Mengingat bahwa kebijakan pembangunan merupakan bagian dari kebijakan publik secara umum dan harus konsisten dengan kebijakan publik tersebut, maka kebijakan pendidikan juga harus demikian. Untuk memenuhi tujuan pembangunan negara bangsa di

bidang pendidikan, kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan.

2.2.2 Industri Pertambangan

Salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sektor pertambangan. Perusahaan-perusahaan pertambangan mengelola sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sektor pertambangan merupakan sumber dana negara yang diperoleh melalui iuran tetap, iuran produksi, dan penjualan barang tambang. Sektor ini merupakan sektor yang menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Oleh karena itu, usaha pertambangan merupakan salah satu pilar utama industri pertambangan nasional dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan.

Batu bara, minyak dan gas, logam dan komoditas lainnya, batubatuan, dan sumber daya lainnya semuanya ditambang oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Batu bara merupakan salah satu dari sekian banyak subsektor pertambangan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

2.2.1 Departemen *Government External* dan *Public Relations*

GPR merupakan program prioritas utama yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang inisiatif pemerintah dan mendorong partisipasi dalam pembangunan.

Manajemen informasi dan komunikasi yang berkelanjutan merupakan landasan dari upaya humas pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan dan dukungan publik terhadap inisiatif dan kebijakan pemerintah. Tujuan humas pemerintah adalah:

- a. untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya dengan menggunakan pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) dari keprihatinan publik.
- b. Menciptakan suatu lembaga untuk jaringan komunikasi.
- c. Menciptakan dan mengawasi penerapan peraturan GPR
- d. Menawarkan dan mendistribusikan materi untuk informasi publik.

Adapun divisi-divisi dari *Government Public Relations* (GPR) yang dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Divisi *Govrel*

Salah satu cara untuk menggambarkan govrel adalah sebagai sebuah proses. Perwakilan urusan publik bertanggung jawab atas prosedur ini, yang melibatkan edukasi baik kepada pemerintah maupun bisnis. Proses edukasi ini dapat diibaratkan seperti membangun jembatan. Pemerintah, yang menentukan kebijakan, sering kali hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang bagaimana perusahaan dijalankan. Namun, perusahaan-perusahaan juga tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang proses pembuatan peraturan. Kemungkinan terjadinya miskomunikasi antara pemerintah dan perusahaan akan berkurang dengan

dibentuknya Divisi Govrel, yang akan menjadi jembatan antara kedua belah pihak.

Govrel memiliki peran andil dalam penerapan kebijakan perusahaan pertambangan dalam hal peningkatan masyarakat yang dimana tugas pokoknya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat, pemerintah setempat dengan pihak perusahaan. Dengan adanya divisi *Govrel* ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis kepada masyarakat dan pemerintah setempat dalam melakukan hal-hal yang sifatnya pengembangan.

2. Divisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan, termasuk perusahaan tambang di Indonesia, salah satunya PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), wajib melaksanakan program CSR. Setiap perusahaan memiliki kewajiban sosial, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Perusahaan diharuskan untuk memenuhi kewajiban ini karena jika tidak, maka akan dikenakan sanksi dari pemerintah.

Perusahaan memiliki kewajiban sosial terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Ini adalah contoh bagaimana pemilik perusahaan memperhatikan bagaimana mereka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kehadiran CSR membantu

sejumlah pemangku kepentingan, termasuk lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan bisnis itu sendiri.

Penerapan program CSR pada perusahaan pertambangan pada umumnya meliputi 5 aspek, yaitu:

- a. Program CSR yang disebut hubungan masyarakat berfokus pada sektor keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan.
- b. Pemberdayaan masyarakat, yang mencakup topik-topik seperti pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- c. Pembangunan infrastruktur, yang meliputi sarana pendidikan, peribadatan, pemberdayaan ekonomi, dan fasilitas umum lainnya.
- d. Bencana Alam dan Lingkungan: Program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar tambang apabila terjadi bencana alam dan mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
- e. Operasional: Program ini mengacu pada komponen program yang berupaya membantu kegiatan operasional Desa. (E. Oktarianasari, M. Yusuf, n.d.).

3. Divisi *Land Akuisisi* (LA)

LA merupakan divisi yang bertujuan untuk melakukan pembebasan lahan serta pengukuran lahan. Peran LA sangat penting dalam perusahaan, penanggung jawab apabila dalam pembebasan lahan tersebut memiliki masalah atau masih atas nama masyarakat sebagai pemilik lahan sehingga peran LA sangat dibutuhkan sebagai negosiator dalam pembebasan lahan dan pengukuran lahan.

4. *External Program Improvement*

Peningkatan adalah proses membawa sesuatu dari satu keadaan ke keadaan yang dianggap lebih baik, sering kali melalui beberapa jenis kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Improvement dalam perusahaan pertambangan sangat penting, dalam perannya *improvement* berfungsi sebagai pemberi informasi dalam bentuk berita terkait apa yang program telah dijalankan oleh perusahaan pertambangan serta pembuatan laporan-laporan terkait program yang telah dilaksanakan.

2.2.2 **Pengelola Pertambangan**

Menurut peraturan pemerintah, "pertambangan" mengacu pada setiap atau semua tahapan operasi yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan yang dilakukan setelah penambangan. Penambangan didefinisikan sebagai kegiatan

menggali (mengambil) barang tambang dari dalam bumi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manajemen pertambangan adalah pengambilan cadangan bahan tambang dari dalam tanah (lembaga) secara metodis dan terencana untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dipasarkan. Pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, penambangan (penggalian), pengolahan, penggunaan, dan penjualan sumber daya yang digali (mineral, batu bara, panas bumi, minyak, dan gas) semuanya termasuk dalam bidang ilmu yang dikenal sebagai ilmu pertambangan.

Jika pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), maka nilai tambah riil bagi perekonomian nasional dapat dimaksimalkan. Tujuan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri adalah untuk meningkatkan nilai tambah sehingga produk pertambangan batubara dan mineral memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, dan memajukan perluasan ekonomi nasional.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertambangan batu bara memiliki aspek baik dan buruk. Oleh karena itu, untuk memastikan kesejahteraan penduduk, praktik pengelolaan pertambangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sangatlah penting untuk membangun manajemen

pertambangan batubara berkelanjutan yang berbasis ekologi. Oleh karena itu, pertambangan batubara harus berdampingan dengan inisiatif pengelolaan dan perlindungan lingkungan dengan menciptakan pengelolaan pertambangan mineral berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, yang diadopsi pada tahun 1992, menyatakan bahwa "Manusia merupakan pusat perhatian pembangunan berkelanjutan." Hal ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan atau menyelaraskan antara pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Manusia memiliki hak untuk hidup produktif dan sehat yang selaras dengan lingkungan.

Pertambangan mineral dan batubara (termasuk ekstraksi aspal padat, batuan aspal, batubara, dan gambut) dikategorikan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2012. Pertambangan mineral dibagi menjadi:

1. Pertambangan mineral radioaktif
2. Pertambangan mineral logam
3. Pertambangan mineral bukan logam, dan
4. Pertambangan batuan

Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, terutama yang berasal dari pertambangan. Barang tambang adalah jenis-jenis produk yang ditambang di negara kita dan mencakup hal-hal seperti batu bara,

timah, bijih besi, bijih emas, tembaga, intan, dan nikel (Sudrajat Nandang, 2013).

2.2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan yang merupakan upaya untuk meningkatkan daya masyarakat dengan mendorong, menginspirasi, dan menciptakan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta dalam bentuk mengembangkannya, berasal dari kata daya yang secara bahasa berarti tenaga atau kekuatan (Mubyarto, 2000).

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan cara yang produktif sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Akses terhadap empat hal, yaitu sumber daya, teknologi, pasar, dan permintaan, semuanya harus ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan nilai tambah. Menurut (Sumadiningrat, 1999) ekonomi komunitas mengacu pada semua kegiatan ekonomi dan inisiatif komunal untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mungkin berkontribusi pada proses pembangunan nasional.

Secara konseptual, pemberdayaan berkaitan dengan pengertian kekuasaan karena istilah "kekuasaan" (atau "pemberdayaan") adalah asal

mula konsep pemberdayaan. Jika dilihat dari perspektif kolaborasi, pemberdayaan adalah sebuah prosedur metodis. Pemberdayaan sebagai sebuah proses melibatkan sejumlah tindakan untuk meningkatkan ketahanan atau keberdayaan kelompok-kelompok sosial yang rentan, seperti kelompok miskin.

Prinsip dasar dari pemberdayaan adalah mengubah ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai keberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, ada banyak cara untuk melihat kemiskinan. Namun, hanya ada dua standar mendasar dalam memandang kemiskinan.

- a. Kesulitan ekonomi. Dalam situasi ini, kemiskinan dapat diidentifikasi dengan tanda-tanda seperti kurangnya dukungan masyarakat (kekurangan dana), rendahnya tingkat pendidikan, kelaparan, dan faktor-faktor lain yang berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Dalam hal ini, Greetz pernah meyakinkan kita bahwa orang Jawa (Indonesia) miskin bukan karena malas tetapi malas karena dihindangi kemiskinan yang berkepanjangan. b. Kemiskinan yang dipengaruhi oleh pola perilaku dan sikap mental masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah (menerima apa adanya) sebelum berusaha, merasa dirinya kurang berharga, perilaku hidup yang boros, dan kemalasan.

Selain menjadi sebuah keuntungan, perbedaan dalam standar hidup manusia berfungsi sebagai "peringat" bagi kelompok manusia yang lebih

"berdaya" untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Umat Islam perlu dibesarkan dengan kesadaran seperti ini, dengan sikap dasar kasih sayang dan kepekaan terhadap sesama. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Hasyr/59:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa kesalahan persepsi manusia terhadap ayat-ayat Allah SWT, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda, menjadi penyumbang utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, apa yang kemudian diistilahkan sebagai "kemiskinan absolut" dalam teori sosiologi sebenarnya tidak perlu terjadi jika umat Islam memahami firman Allah SWT di atas secara tepat dan utuh (kaffah). Islam lebih melihat kemiskinan dari sisi non-ekonomi, seperti kelesuan, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki jiwa kemandirian. Akibatnya, ketika pemberdayaan dikonseptualisasikan, variabel non-ekonomi sama pentingnya dengan sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan lain-lain). Rasulullah SAW telah menawarkan solusi untuk masalah kemiskinan. Rasulullah SAW memberikan contoh pemberdayaan yang sangat canggih, dengan menekankan pada bantuan sementara dan berfokus pada "menghilangkan penyebab kemiskinan" daripada "menghilangkan kemiskinan".

Proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, dan setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya:

- a. Tahap pengembangan kesadaran dan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli, pada tahap ini mereka menyadari perlunya peningkatan kesadaran yang kuat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ini adalah tahap awal. Para pemberdaya sekarang berusaha untuk menyiapkan keadaan yang diperlukan untuk mendukung proses pemberdayaan yang sukses. Keinginan untuk mengubah keadaan untuk membangun masa depan yang lebih baik akan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran mereka akan situasi yang ada.
- b. Tahap transformasi kemampuan terdiri dari wawasan pengetahuan, keterampilan untuk menyampaikan wawasan, dan keterampilan dasar untuk memungkinkan partisipasi dalam pertumbuhan. Masyarakat akan belajar tentang informasi dan keterampilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tuntutan-tuntutan ini pada tahap kedua, dan mereka akan mendapatkan wawasan dan kemampuan mendasar yang mereka butuhkan.
- c. Tahap pengembangan kecakapan intelektual, bakat, dan kapasitas di mana inisiatif dan daya cipta dibangun untuk mewujudkan kemandirian. Tahap ketiga adalah tingkat pengayaan atau pengembangan intelektual yang diperlukan agar mereka dapat mengembangkan kapasitas untuk mandiri. Jika masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini, mereka dapat melakukan pembangunan secara mandiri.

2.3 Kerangka Konseptual

